



Buletin Parlementaria

Nomor 1075/III/X/2019 • Oktober 2019



Ketua DPR Ucapkan Selamat Kepada Jokowi - Ma'ruf



4 Pimpin DPR Sambut
Positif Pidato Pertama
Presiden Jokowi



5 Kerja Sama DPR dan
Pemerintah 2019-2024
Akan Lebih Baik



Ketua DPR RI Puan Maharani berfoto bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta Pimpinan MPR RI dan Pimpinan DPD RI . Foto: Jaka/HR

Ketua DPR Ucapkan Selamat Kepada Jokowi-Ma'ruf

Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih untuk masa jabatan 2019-2024 digelar pada Sidang Paripurna MPR RI di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10). Sidang Paripurna MPR RI dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dengan didampingi sembilan Wakil Ketua MPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin (Korpolkam), Wakil Ketua DPR RI Suffmi Dasco Ahmad (Korekku), Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel (Korinbang), dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Korkesra) turut hadir dalam

pelantikan ini. Usai seluruh rangkaian acara pelantikan, Puan memberikan selamat kepada Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

Acara pelantikan Presiden dan Wapres hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR RI itu, memimpin mengheningkan cipta dan dilanjutkan dengan membuka Sidang Paripurna. Dalam sambutannya, Bamsoet turut membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap hasil Pemilu yang digelar 17 April 2019 lalu.

Setelah itu dilakukan pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diteruskan dengan penandatanganan Berita

Acara Pelantikan. Pimpinan MPR RI menyerahkan berita acara pelantikan yang dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Wakil Presiden dari Jusuf Kalla (Wapres masa jabatan 2014-2019) ke Ma'ruf. Pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wapres dilakukan di hadapan seluruh Anggota MPR RI.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," kata Presiden Jokowi saat mengucapkan sumpahnya. Usai Presiden Jokowi mengucapkan



sumpah, Wapres Ma'ruf juga turut mengucapkan sumpah jabatan.

Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan untuk pertama kalinya sebagai pemimpin negara 5 tahun ke depan. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus sebuah kesempatan besar.

"Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," jelas Presiden Jokowi di hadapan seluruh Pimpinan dan Anggota

MPR RI serta tamu undangan.

Oleh karena itu, jelas Presiden Jokowi, lima tahun ke depan Pemerintah akan mengerjakan pembangunan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Terkait regulasi, Pemerintah akan mengajak DPR RI untuk menerbitkan 2 Undang-Undang besar, yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Momentum pengucapan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wapres ini menandai secara resmi dimulainya masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai Presiden RI dan masa jabatan pertama Ma'ruf Amin sebagai Wapres RI. Selain kehadiran Anggota MPR RI dan tokoh-tokoh nasional, acara pelantikan itu juga dihadiri oleh beberapa kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus negara sahabat. ■ dep,mh/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Taharjah, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindy, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afduhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan DISTRIBUSI (GRATIS)

Pimpinan DPR Sambut Positif Pidato Pertama Presiden Jokowi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan

Rachmad Gobel menyambut positif pidato pertama Presiden Joko Widodo masa jabatan 2019–2024. Hal tersebut menjadi sebuah harapan dan keinginannya dari keberlanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke depan.

“Saya menyambut baik pidato Presiden yang pertama. Apa yang beliau sampaikan itu harapan dari keberlanjutan kepemimpinannya. Saya lihat beliau ingin memaksimalkan kabinetnya. Bagaimana saat ini kita sedang berusaha mengejar ketertinggalan selama berpuluh-puluh tahun. Dan ini menurut saya sangat positif,” ungkap Rachmad saat ditemui *Parlementaria* usai acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

Terkait isi pidato Presiden Jokowi yang akan membuat regulasi tentang cipta lapangan kerja, Rachmad menilai hal tersebut memang sangat dibutuhkan. Pasalnya saat ini banyak Undang-Undang masih tumpang tindih. Sebut saja regulasi yang memudahkan investor untuk berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Namun di sisi lain, tidak jarang aturan tentang investasi berubah-ubah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi calon investor, yang juga berdampak keterbatasan lapangan pekerjaan.

Lebih lanjut politisi asal daerah pemilihan Gorontalo ini menilai akan mendorong pengembangan sektor



Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel. Foto: Jaka/HR

manufaktur, pertanian dan kelautan. Mengingat, Indonesia merupakan negara agraris, yang juga sangat luas wilayah perairannya, sehingga harus ada *added value* atau nilai tambah yang bisa diambil.

“Kalau sektor manufaktur, sudah otomatis akan masuk dalam era industri 4.0. Sedangkan sektor pertanian dan kelautan, dimana negara kita merupakan negara agraris, namun memiliki jumlah luas perairan yang sangat besar, maka harus ada *added value* yang bisa diambil dari kondisi alam Indonesia yang demikian. Hal itulah yang akan kami dorong ke depan,” tambah Rachmad.

Dengan mendorong pengembangan di sektor pertanian dan kelautan, lanjut Rachmad, maka Indonesia bisa membangun industri pangan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah mewujudkan kedaulatan pangan.

“Itu semua secara langsung juga bisa ikut mengembangkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri. Belum lagi industri kecil yang

berbasis budaya, seperti *handycraft*, meubel. Saya pernah menanyakan hal ini ke salah satu kolega saya, dikatakannya setiap peningkatan 1 miliar dolar Amerika itu bisa tumbuh 100 ribu pekerja. Belum lagi sektor industri-industri lainnya,” ucap Rachmad.

Seharusnya, kata Rachmad, Indonesia bisa menjadi eksportir nomor satu, namun masih kalah dengan Vietnam dan negara lainnya. “Oleh karena itulah saya akan mendukung pemerintah untuk mengembangkan industri UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru, yang pada akhirnya akan mengurangi angka pengangguran yang ada,” pungkasnya. ■ *ayu/es*

Kerja Sama DPR dan Pemerintah 2019-2024 akan Lebih Baik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai kerja sama DPR RI dengan Pemerintah dalam pengambilan-pengambilan keputusan kebijakan pemerintahan periode 2019-2024 akan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan menguatnya dukungan partai politik di Parlemen kepada Pemerintah. Saat ini memang kurang lebih 60 persen partai politik yang ada mulai merapat kepada Pemerintah.

Hal ini disampaikan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ketika menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10s). Namun menurutnya *check and balances* akan tetap berjalan karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR RI. Maka sebagai wakil rakyat, Dasco berharap para Anggota Dewan tidak lupa akan tugasnya.

“Fungsi dari parlemen untuk *check and balances* dan menjalankan tupoksinya yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran tetap bisa berjalan dengan baik. Saya pikir bahwa dalam rangka *check and balances*, kritik-kritik membangun yang dilakukan oleh parlemen itu juga harus dapat diterima dengan baik oleh pemerintah pada saat ini,” imbu Dasco.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan bahwa perubahan pandangan merupakan hal yang lumrah bagi para Anggota DPR RI, karena mereka memperjuangkan pandangan rakyatnya. “Keputusan-keputusan yang diambil nantinya, tentu kita belum tahu akan seperti apa. Namun kita percaya bahwa kawan-kawan di Parlemen ini tetap akan memegang teguh janji-janji

kepada konstituennya,” tambahnya.

Di sisi lain, Dasco sendiri mengaku ia dan partainya tidak akan melakukan intervensi calon Menteri yang akan membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Namun ia berpesan agar kejadian Menteri yang tidak boleh ikut rapat di DPR RI tidak terulang, sehingga Presiden dan Wapres harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempatnya.

“Kalau pemilihan menteri itu kita tidak mau intervensi, karena merupakan hak prerogatif daripada Presiden untuk menempatkan pembantu-pembantunya. *Toh* yang bertanggung jawab pada akhirnya nanti

adalah Presiden. Namun kami imbau ada pengalaman yang biasanya menjadi guru yang sangat baik yang kemudian bisa diambil pelajaran bagi kita semua,” tukas legislator dapil Banten III itu. ■ *er/sf*



Wakil Ketua DPR RI
Sufmi Dasco Ahmad.
Foto: Singgih/HR

DPR Memulai Kembali Diplomasi Parlemen

Diplomasi Parlemen kembali dilakukan di awal periode DPR RI periode 2019-2024. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memimpin delegasi DPR RI ke pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-141 di Belgrade, Serbia. Pada pertemuan IPU kali ini, delegasi DPR RI membicarakan penguatan hukum

internasional.

Dalam kesempatan strategis itu, DPR RI kembali menyoroti pentingnya hukum internasional melindungi bangsa yang lemah dan tertindas dari hegemoni bangsa-bangsa kuat. Dalam konteks ini DPR RI menyoroti kemerdekaan Palestina. DPR RI memandang, banyak resolusi Dewan Keamanan

(DK) PBB tentang Palestina belum dijalankan oleh negara-negara Anggota DK PBB.

Bagi DPR RI sendiri, resolusi tersebut bisa diterjemahkan menjadi undang-undang dengan meratifikasi konvensi. Sidang Umum IPU ini digelar pada 13-17 Oktober 2019. Acara dibuka Presiden Serbia Predsednik Srbije. Lebih dari 1700 peserta hadir di IPU ini. Sidang ini mengangkat tema “Penguatan Hukum Internasional: Peran dan Mekanisme Parlemen dan Kontribusi Kerja Sama Kawasan”.

Dalam keterangan persnya, Azis menyampaikan, rangkaian pertemuan IPU diawali dengan pertemuan ASEAN + 3 dan Grup Geopolitik Asia Pacific, yang merupakan pertemuan konsultasi untuk menyamakan visi kawasan terhadap isu yang berkembang di IPU. Presiden IPU, Gabriela Baron yang datang pada pertemuan Asia Pasifik menegaskan, Asia Pasifik sebagai kawasan yang dinamis adalah kawasan yang sangat berpengaruh di IPU.

Tahun ini juga bertepatan dengan 130 tahun IPU. Momen 130 tahun IPU ini akan digunakan oleh DPR RI periode 2019-2024 untuk semakin memperkuat peran dan kontribusi DPR RI di forum internasional. “Membangun perdamaian dan keamanan di tengah dinamika dunia memerlukan berbagai pendekatan dan kebijakan. Tentu saja hal ini melibatkan berbagai aktor di tingkat nasional dan internasional, termasuk anggota parlemen,” papar Azis.

Bersama Azis, turut serta Anggota DPR RI lainnya seperti Nurul Arifin (F-PG), Willy Aditya (F-NasDem), dan Jon Erizal (F-PAN). Azis sendiri mengaku, Sidang IPU ini merupakan kali pertama yang dihadirinya sebagai Wakil Ketua DPR RI. Politisi Partai Golkar ini, percaya bahwa Sidang IPU akan memberi pencerahan dan masukan yang baik dalam perbaikan kinerja Parlemen ke depan. ■ mh/sf



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memimpin delegasi DPR RI ke pertemuan IPU ke-141. Foto: Dok/HR

DPR Saat ini Sudah Sangat Terbuka

Anggota DPR RI Putra Nababan menilai DPR RI saat ini sudah sangat terbuka dalam menerima berbagai aspirasi. Oleh karenanya jika ada masukan, saran bahkan kritik dari masyarakat, ia berharap bisa disampaikan secara langsung kepada Anggota DPR RI.

“Saya menilai DPR RI saat ini sudah sangat terbuka *kok*. Oleh karenanya jika ada aspirasi, masukan bahkan kritik untuk DPR, baik itu terkait kinerja maupun undang-

undang yang tengah dibahas bisa disampaikan secara langsung kepada DPR, tidak hanya melalui *postingan-postingan* di media sosial,” ujar Putra kepada **Parlementaria** DPR RI di Senayan Jakarta, baru-baru ini.

Bahkan, lanjut Putra, Negara Indonesia dibangun atas dasar musyawarah dan mufakat.

Bukan melalui adu kekuatan. Oleh karenanya komunikasi menjadi “kunci” atas segala permasalahan bangsa yang ada.

Demonstrasi, diakui Putra menjadi salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi Undang-Undang.

“Namun tentunya demonstrasi yang

”

JIKA ADA ASPIRASI, MASUKAN BAHKAN KRITIK UNTUK DPR, BAIK ITU TERKAIT KINERJA MAUPUN UNDANG-UNDANG YANG TENGAH DIBAHAS BISA DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG KEPADA DPR

dimaksud berupa penyampaian pendapat, aspirasi yang santun dan tidak anarkis. Pasalnya, demonstrasi anarkis malah dapat merugikan individu lain yang tentu juga memiliki hak mendapat kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas,” tegas Putra.

Terkait dengan visi dan misinya, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa memberikan solusi bagi permasalahan pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan menjadi konsentrasinya ke depan. Hal yang pertama akan dilakukannya adalah mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

“*Passion* saya, bagaimana bisa mencari solusi atas permasalahan pengangguran. Untuk itu yang pertama kali akan saya lakukan adalah bagaimana mengembangkan Sumber Daya Manusia yang ada. Salah satunya dengan mengembangkan diri mereka, merangsang anak muda untuk menemukan minat dan bakat mereka,” ungkapnya.

Jika sudah diketahui minat dan bakatnya, pastinya mereka tidak hanya bisa menghidupi diri sendiri, namun juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang dibutuhkan bagi masyarakat lainnya. “Intinya, saya akan berusaha memberikan jalan keluar bagi generasi muda supaya mereka tidak frustrasi,” papar Legislator dapil DKI Jakarta I. ■ **ayu/es**

Anggota DPR RI
Putra Nababan.
Foto: Arief/HR



Pembahasan RUU 'Carry Over' Harus Dituntaskan



Anggota DPR RI Muhammad Farhan. Foto: Rumi/HR

Anggota DPR RI Muhammad Farhan menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang di-*carry over* atau belum tuntas pembahasannya oleh Anggota DPR RI Periode 2014-2019 bukanlah sebuah beban bagi Anggota DPR RI Periode 2019-2024. Ia lebih menganggap hal tersebut sebagai sebuah kewajiban yang harus dituntaskan.

“Ya memang saya mendengar ada beberapa RUU yang merupakan *carry over* atau warisan dari periode sebelumnya. Saya tidak menganggap itu semua sebagai sebuah beban, namun itu lebih kepada kewajiban

kami sebagai wakil rakyat harus melanjutkannya. Meskipun saya pribadi belum mengetahui RUU apa saja yang ditinggalkan,” ujar Farhan kepada **Parlementaria** baru-baru ini.

Terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sempat mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat, Farhan menilai hal tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi. Pasalnya, Presiden sudah menunda pengesahan RKUHP tersebut. Jika kemudian RKUHP tersebut termasuk dalam RUU yang diwariskan ke DPR RI saat ini, ia menilai tentu hal tersebut harus dikaji ulang. Termasuk mempertimbangkan berbagai

”

JIKA ADA ASPIRASI MASYARAKAT YANG BISA DIAKOMODIR TENTU HARUS DIPERTIMBANGKAN

aspirasi dan masukan masyarakat terkait isi dari RKUHP tersebut.

Sementara itu, terkait aspirasi tentang Revisi UU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Farhan mengaku masih menantikan keputusan Presiden. Mengingat Undang-Undang tersebut sudah disahkan sebelumnya. Jika memang masih ada yang tidak setuju dengan Undang-Undang tersebut, ia menilai masih ada lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan *judicial review*.

“Tentu yang pertama harus dilakukan adalah mengkaji ulang RUU KUHP. Jika ada aspirasi masyarakat yang bisa diakomodir tentu harus dipertimbangkan. Sedangkan untuk revisi UU KPK, karena sudah disahkan dalam Paripurna DPR RI, tentu kami menunggu keputusan dari Presiden, apakah akan merevisi UU tersebut atau tidak,” ungkap politisi Fraksi NasDem ini.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwasanya hingga saat ini ia belum mengetahui secara pasti RUU yang harus dilanjutkan pembahasannya dari DPR RI periode sebelumnya. Namun ia meyakini akan lebih banyak mempelajarinya lewat kajian-kajian ilmiah, tentunya dibantu dengan para tenaga ahli baik yang melekat kepada anggota dewan, maupun tenaga ahli yang ada di fraksi dan komisi mendatang. ■ [ayu/es/sf](#)

Prioritas Legislasi Harus Sejalan Rencana Kerja Pemerintah

Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan, dalam rencana kerja DPR RI periode 2019-2024 terutama di bidang legislasi agar tidak terlalu banyak, namun harus menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah. Regulasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, akan menjadi skala prioritas utama di bidang legislasi.

“Rencana kerja lima tahunan itu harus jelas. Kalau legislasi

itu, saya usulkan jangan terlalu banyak *kayak* yang lalu, tetapi sesuai dengan rencana kerja pemerintah saja. Dalam lima tahun rencana kerja pemerintah, regulasi apa yang dibutuhkan? Itu yang kita bikin skala prioritas utama, baru skala prioritas kedua dan skala prioritas berikutnya,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

Jadi, lanjut Firman, tahapan-tahapan dalam pembuatan legislasi harus terukur. Ia juga mencontohkan

beberapa Undang-Undang (UU) diantaranya tentang Mineral dan Batubara (Minerba), Minuman Beralkohol (Minol) hingga tentang perkelapasawitan yang sangat dibutuhkan regulasinya, namun ternyata masih diabaikan dalam penyelesaiannya.

“Ada UU yang kita butuh, namun kita abaikan. Seperti UU Minerba tidak selesai, mengenai Minol yang sampai sekarang masih menimbulkan ketidakpastian investasi. Kemudian perkelapasawitan yang sudah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara hampir Rp 500 triliun itu kita abaikan dan tidak kita lindungi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,” rincinya.

Ia menambahkan, DPR RI memang mempunyai mandatori pembuatan undang-undang. Tetapi undang-undang itu haruslah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepentingan kelompok atau atas nama orang per orang atau pula atas nama kepentingan asing. Akan sangat bahaya bila pembuatan UU diintervensi oleh kepentingan kelompok atau golongan.

“UU yang kita susun, ini harus ada kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD RI. Kalau UU yang kita buat, asas manfaatnya bagi bangsa dan Negara ada atau tidak? Memenuhi rasa keadilan atau tidak? Ada diskriminasi atau tidak? Bila diberlakukan, undang-undang ini bisa sejalan atau tidak? Nah kalau tidak, maka itu akan rentan di *judicial review*,” tukas politisi Fraksi Partai Golkar itu. ■ es



Anggota DPR RI Firman Soebagyo. Foto: Arief/HR

Penyelesaian Karhutla Masih Belum Rampung

Munculnya titik kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa masih terjadi hingga satu pekan terakhir. Hal tersebut membuat Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin merasa heran dengan kinerja pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia mengatakan, penyelesaian kebakaran hutan hingga kini belum rampung meskipun sudah mulai masuk musim penghujan.

Legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menyoroti bahwa pengulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terus menerus setiap tahunnya menunjukkan tidak ada efek jera pada pelaku pembakar hutan dan lahan. Sanksi untuk pelanggar kebakaran hanya membuat efek kejut saja yang tidak menakuti para pelaku lain untuk tidak melakukan pembakaran.

“Perusahaan pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan

menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga saat ini 9.905 perusahaan. Hanya 22 persen saja sekitar 2.179 pemegang izin usaha kehutanan dan perkebunan memenuhi kewajiban memberikan laporan pengendalian karhutla sampai September 2019,” terang Akmal dalam berita rilisnya, Senin (14/10).

Akmal menjelaskan, kondisi regulasi

yang ketat dari pemerintah, berupa kewajiban perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan dan perkebunan untuk menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) pencegahan kebakaran hutan, serta memfasilitasi kelompok masyarakat peduli api (MPA) banyak yang tidak dilaksanakan. Lemahnya penerapan sanksi pelanggaran terhadap pelaku usaha kehutanan dan perkebunan membuat perusahaan asing maupun dalam negeri kurang menghormati aturan yang berlaku.

“Yang sudah nampak disegel 64 perusahaan, dimana 20 nya (perusahaan) asing akibat pelanggaran. Jangan informasi penyegelan perusahaan-perusahaan ini hanya menjadi simbol kinerja, namun titik-titik kebakaran masih saja terus muncul baru di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa. Perlu penyelesaian yang tuntas untuk meminimalisir kebakaran ini, sampai tidak ada lagi muncul asap (dari Indonesia) yang mengganggu negara lain,” pungkasnya.

■ dep/es

Anggota DPR RI
Andi Akmal Pasluddin.
Foto: Mri/HR



Jambi Dilanda Kabut Asap, Legislator **Imbau Warga** **Jaga Kesehatan**



Anggota DPR RI Sutan Adil Hendra. Foto: Dsc/HR

Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti Kota Jambi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir pertengahan Oktober lalu, terutama pada pagi hari, kabut asap di Kota Jambi begitu pekat. Kabut asap ini merupakan asap kiriman dari sejumlah kabupaten yang mengalami karhutla di Provinsi Jambi itu.

Berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Kota Jambi, dari hasil pengukuran Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menggunakan alat pengukur kualitas udara *Air Quality Monitoring System* (AQMS), per pukul 06.30 WIB, Sabtu 12 Oktober 2019 lalu, nilai konsentrasi parameter partikulat PM 2.5 mencapai 630. Angka ini di atas baku mutu, yang artinya kualitas udara berbahaya.

”

**YANG BERAKTIFITAS
DI LUAR RUMAH,
SAYA IMBAU
MENGUNAKAN
MASKER, DAN
MINUM AIR PUTIH
YANG BANYAK**

Menanggapi status kualitas udara “Berbahaya” di Jambi itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sutan Adil Hendra dalam *press release* yang diterima *Parlementaria*, pada Rabu (16/10) menyampaikan pesannya. Sutan mengingatkan warga Jambi untuk dapat menjaga kesehatan selama menghadapi situasi ini.

Serta, sambung legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi ini, pesan yang sama juga ia sampaikan kepada generasi muda baik di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi secara keseluruhan. Khususnya, bagi anak-anak muda Jambi yang bersekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK hingga Perguruan Tinggi.

“Khususnya, untuk anak-anakku yang bersekolah SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi yang beraktifitas di luar rumah, saya imbau menggunakan masker, dan minum air putih yang banyak. Semoga Allah melindungi kita semua. Aamiin,” pungkas Legislator Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.

■ pun/sf

Legislator Desak Pemerintah Angkat Guru Honorer Jadi PPPK

Anggota DPR RI Sri Meliyana mendesak pemerintah untuk segera mengangkat Guru Honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) yang sudah tidak memenuhi kualifikasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jumlah GTT atau Guru Honorer saat ini banyak sekali, kalau yang masih berusia 35 tahun ke bawah, masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Namun permasalahannya, banyak diantara mereka yang sudah tidak bisa atau tidak memenuhi kualifikasi menjadi CPNS. Oleh karena itu salah satu jalan adalah mengangkat mereka menjadi P3K,” ujar Meli, begitu ia biasa disapa, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).

Hal tersebut, lanjut Meli, semata untuk mengurangi beban pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui GTT atau guru honorer selama ini proses penggajiannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Meski demikian, politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pengangkatan PPPK itu sendiri tetap harus melalui test atau seleksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas, kapasitas dan kompetensi para guru dalam mengajar anak-anak yang notabene merupakan generasi penerus bangsa.

“Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika mereka tidak lulus PPPK? Ya, selamanya mereka akan menjadi guru honorer yang penggajiannya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu saya berharap GTT yang sudah lama mengabdikan tetap harus meng-



Anggota DPR RI Sri Meliyana. Foto: Runi/HR

”
JUMLAH GTT ATAU GURU HONORER SAAT INI BANYAK SEKALI, KALAU YANG MASIH BERUSIA 35 TAHUN KE BAWAH, MASIH BISA MENGIKUTI SELEKSI CPNS

upgrade atau mengembangkan diri. Baik dengan melanjutkan kuliah, maupun keterampilan atau keahlian

lain seperti keterampilan komputer dan sebagainya. Intinya, yang dapat merubah nasib mereka ya mereka sendiri,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Meli meminta agar pemerintah segera merampungkan proses pendataan data pokok pendidikan (dapodik) nasional. Dari sana akan diketahui secara pasti jumlah guru PNS, GTT atau Guru honorer lainnya yang ada di masing-masing daerah, dan berapa jumlah kebutuhan guru di daerah tersebut. Dengan begitu, akan semakin mudah memetakan beberapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses penggajian tenaga pengajar. ■ ayu/es

Regulasi ASN Tak Boleh Kritis Disesalkan



INGAT YANG DIPERJUANGKAN DALAM REFORMASI ITU ADALAH KEMERDEKAAN BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT

Regulasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap kritis di media sosial (medsos) terhadap kebijakan pemerintah sangat disesalkan. Padahal di era reformasi seperti sekarang ini, semua lapisan masyarakat bebas menyampaikan pikiran dan pendapatnya secara merdeka, asal tidak menyebar kebencian.

Anggota DPR RI Irwan saat ditemui *Parlementaria* di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10) menegaskan, tidak pada tempatnya pemerintah melarang ASN bersikap kritis dan menyampaikan pendapatnya di medsos terhadap kebijakan Pemerintah yang mungkin perlu dikoreksi dan dikritisi. "Pemerintah tidak boleh berlebihan. ASN punya hak politik, tidak seperti kawan-kawan TNI dan Polri," tandasnya.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) juga diimbau Irwan agar bisa membedakan mana kritik dan mana hoaks di medsos. Regulasi yang ada sudah sangat jelas membedakan tindak pidana di medsos. Dalam pandangan legislator asal Kalimantan Timur itu, melarang daya kritis ASN sama saja

mengurangi kecerdasan bangsa ini. Mungkin saja ada gagasan dan pikiran ASN di medsos yang sangat dibutuhkan bangsa.

"Kalau semua dikekang, kita mundur. Ingat yang diperjuangkan dalam reformasi itu adalah kemerdekaan berkumpul dan berpendapat. UU sudah cukup melindungi semuanya," urai Irwan. Sementara itu, saat ditanya masa depan pemerintahan Joko Widodo lima tahun mendatang, ia optimis akan berjalan baik. Apalagi, ada program pembangunan SDM yang bisa mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

"Presiden Jokowi akan fokus membangun SDM dalam lima tahun ke depan. Soal teknis dan strateginya beliau tentu punya pembantu. Yang kita butuhkan bangsa ini bersatu, kurangi berkonflik, kemudian kita bisa setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia,"

tutup legislator Fraksi Partai Demokrat itu. ■ mh/sf

Anggota DPR RI Irwan.
Foto: Arief/HR



Penghapusan Asas 'Cabotage' Dinilai Janggal



Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Dok/HR

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Sigit Sosiantomo mengkritik usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menilai UU Pelayaran masih relevan dan terasa janggal jika sejumlah pihak mengusulkan revisi UU itu dengan tujuan menghilangkan asas *cabotage*. Padahal asas *cabotage* ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut lokal dan nasional.

"Aneh jika ada pihak-pihak yang ingin merevisi UU Pelayaran dan menghilangkan asas *cabotage* dalam UU Pelayaran. Berdasarkan data Bappenas, total potensi sektor maritim Indonesia mencapai 1,2 triliun dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Potensi ekonomi yang begitu besar apakah mau dibuka untuk asing semua? Apalagi Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dicanangkan pada tahun 2014 oleh

Presiden Jokowi," papar Sigit dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, beberapa waktu yang lalu.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu yakin, peraturan asas *cabotage* ini dapat meningkatkan produksi kapal dalam negeri, sebab seluruh kapal yang berlayar di perairan dalam negeri harus berbendera merah putih dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU Pelayaran.

Sigit menuturkan, sejak pemberlakuan asas *cabotage* pertumbuhan pelayaran nasional meningkat pesat. Dari data *Indonesian National Shipowner's Association* (INSA), penerapan asas *cabotage* yang juga didukung para pelaku usaha pelayaran nasional menambah dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya investasi sektor angkutan laut.

Pada tahun 2017, armada

pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas *cabotage* pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.

"Kekuatan armada laut kita cukup besar untuk melayani pelayaran nasional dan juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Jadi, untuk apalagi membuka kran untuk asing. Lebih baik, potensi sektor maritim yang besar ini dikelola dan diselenggarakan oleh kita sendiri untuk kemakmuran rakyat," jelas Sigit yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 ini.

Sigit menjelaskan, selain terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, asas *cabotage* juga bermakna kedaulatan negara (sovereign the country) telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan. Sesuai amanat UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, armada pelayaran nasional menjadi bagian dari pertahanan negara, yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya. Karenanya, Sigit dengan tegas menolak revisi RUU Pelayaran.

"Tahun 2011 Pemerintah sudah pernah mengusulkan revisi UU Pelayaran yang meminta penundaan asas *cabotage* dan saat itu DPR melalui Komisi V tegas menolak. Tentu sekarang, jika ada pihak-pihak yang ingin mengusulkan revisi UU ini lagi, khususnya yang terkait asas *cabotage* kami akan tegas menolaknya karena asas *cabotage* ini jelas sangat dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan angkutan laut dan dunia maritim kita," tandas Sigit. ■ ann/sf

Dyah Roro Dorong Pemerintah Serius Tangani Sampah Plastik

Pengelolaan sampah plastik merupakan permasalahan signifikan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh negara di dunia. Masalah lingkungan hidup tersebut harus segera ditangani secara serius oleh Pemerintah Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia masuk ke dalam peringkat “*second largest plastic polluter in the world*” setelah China.

Menurut riset World Bank, tiap individu di Indonesia menghasilkan 0,8 sampai 1 kilogram plastik per hari. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dyah Roro Esti Widya Putri, saat diwawancarai **Parlementaria**, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).

“Kalau kita bicara mengenai plastik, ini kan sebuah fenomena yang sangat luar biasa, karena dampaknya itu masif sekali. Maka, pemerintah harus secara aktif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang plastik sembarangan yang dapat merusak lingkungan,” ujar Dyah Roro.

Legislator Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan, ketika sampah plastik dibuang secara sembarangan, maka berdampak sangat serius terhadap ekosistem, bukan hanya di darat, tapi juga di laut. Mengingat, sampah plastik tidak bisa terurai begitu saja dalam waktu sekejap, namun memakan waktu yang sangat panjang, bahkan tak bisa terurai.

Tak sampai di situ, tutur salah satu inisiator Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini, sampah plastik yang berujung sampai di laut berpotensi besar berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Sebab menurutnya,



Anggota DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri. Foto: Jaka/HR

sampah plastik tersebut sangat mungkin termakan oleh ikan yang kemudian ikan tersebut nantinya dikonsumsi oleh masyarakat.

“Tentunya, masyarakat yang mengonsumsi ikan akan juga turut mengonsumsi dari isi komponen ikan tersebut. Maka, ada dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Ketika ada dampak terhadap kesehatan dapat membuat masyarakat tidak lagi produktif, sehingga mengurangi kinerja dan kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia” pungkasnya.

Untuk itu, Dyah Roro mengungkapkan, ia selalu mendorong

kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar lebih meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan sekitar. Karena, ketika masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan lingkungannya, maka sama halnya masyarakat itu tidak peduli dengan dirinya sendiri serta masa depannya.

“Jadi, hal-hal berkaitan dengan kesehatan lingkungan seperti ini harus kita sadari bersama. Jangan sampai, isu-isu seperti ini dianggap sepele. Padahal, efeknya sangat luas terhadap manusia dan kehidupan di dunia ini,” pesan legislator dapil Jawa Timur X itu. ■ pun/sf

Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil mendorong evaluasi standar pengamanan terhadap pejabat negara. Hal ini diungkapkannya se usai kejadian penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ketika menghadiri kegiatan di Pandeglang, Banten.

Ia menyampaikan hal itu

kepada *Parlementaria* di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, baru-baru ini. Nasir pun menyampaikan rasa prihatin atas penusukan yang dialami oleh Wiranto dan berharap Wiranto segera pulih dan tidak mengalami luka serius. Selain itu, ia juga meminta agar pelaku agar diproses secara hukum.

Dari kejadian itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan

”

AGAR ADA UPAYA DARI PEMERINTAH UNTUK MENGUSUT KASUS PENUSUKAN ITU SECARA PROFESIONAL SEHINGGA NANTI AKAN KETAHUAN APAKAH PROSEDUR PENGAMANAN TERHADAP PEJABAT NEGARA TELAH DILAKUKAN SESUAI STANDAR ATAU TIDAK

pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan.

“Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” kata legislator dapil Aceh itu.

Ia berharap agar ada upaya dari Pemerintah untuk mengusut kasus penusukan itu secara profesional sehingga nanti akan ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar atau tidak.

“Yang paling penting, publik pasti ingin tahu apa motif dan siapa sebenarnya pelaku penusukan tersebut,” tukasnya.

■ er/sf



Anggota DPR RI M. Nasir Djamil. Foto: Dok/HR

Palapa Ring, Kunci Pemerataan Akses Telekomunikasi

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Dave Akbarshah Fikarno menyambut baik peresmian jaringan serat optik Palapa Ring. Menurutnya, pengoperasian proyek tol langit ini sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo sekaligus menandai reformasi era analog ke era digital di seluruh wilayah Indonesia.

“Peresmian Palapa Ring ini menggenapi janji Presiden Jokowi tentang program Nawacitanya. Yang paling penting adalah bagaimana ini dioptimalkan dengan masyarakat secara luas, sehingga tidak ada wilayah Indonesia yang tidak ter-cover (akses telekomunikasi),” kata Dave kepada *Parlementaria* di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).

Dave menuturkan layaknya jalan tol, hadirnya Palapa Ring adalah kunci bagi pemerataan akses telekomunikasi di seluruh Nusantara. Kemajuan di bidang teknologi informasi ini diharapkan dapat menyatukan Indonesia serta memajukan infrastruktur teknologi informatika,

khususnya di daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Dengan demikian, tidak ada lagi ketimpangan konektivitas antara layanan di wilayah barat dan timur Indonesia.

“Kita dijamin mendapatkan jaringan komunikasi, apakah itu berupa data (visual) atau voice (audio). (Palapa Ring) Memudahkan penyebaran informasi untuk kepentingan pendidikan, usaha, bisnis ataupun kegiatan pelayanan masyarakat, sehingga dapat berlangsung dengan mudah,” sebut Anggota Komisi I DPR RI Periode 2014-2019 ini.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi agar perkembangan teknologi informasi harus digunakan dengan bijak dan tepat sasaran. Ia juga mendorong konektivitas digital hendaknya tidak disalahgunakan dan diikuti dengan peningkatan literasi.

“Seperti kita ketahui, banyak kejadian teroris segala macam itu tersebar melalui media sosial. Media sosial itu bisa berjalan karena ada jaringan komunikasi, jadi pendidikan masyarakat juga harus baik serta pengawadan dari pemerintah untuk sumber-sumber informasi perlu ditingkatkan,” imbuah legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Sebagaimana diketahui, Palapa Ring mulai dikerjakan sejak rahun 2016 dan telah selesai akhir Agustus 2019. Proyek ini diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem telekomunikasi nasional dengan pembangunan serat optik sepanjang 36.000 kilometer dari barat ke timur Indonesia. Terbagi ke dalam tiga paket pengerjaan, yakni Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah dan Palapa Ring Paket

Timur, kini 514 kabupaten/kota diseluruh Indonesia dapat terhubungkan.

■ ann/sf

Anggota DPR RI
Dave Akbarshah Fikarno.
Foto: Arief/HR



Perempuan dan Parlemen Tak Bisa Terpisahkan

Memaknai peringatan Hari Parlemen Indonesia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Anggota DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan gagasannya tentang perempuan dan Parlemen. Menurutnya, keduanya memiliki korelasi yang erat, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Sisi lain, andil perempuan sangat dibutuhkan dalam melahirkan kebijakan publik yang representatif bagi kaumnya.

Anggota DPR RI Periode 2019-2024 ini mengatakan, sampai hari ini *stereotype* seperti 'dapur, kasar dan sumur' tak jarang disematkan kepada perempuan, dan masih kuat melekat di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaitkannya dengan doktrin agama, sehingga melabelkan perempuan yang keluar dari tiga tempat itu sebagai perempuan yang salah arah.

Kendati demikian, ia berpendapat peranan perempuan tidak sesederhana itu. Sebab *stereotype* yang ada saat ini amat dipengaruhi kebijakan negara. "Sebut saja harga bahan kebutuhan pokok, air bersih, listrik, kesehatan anak, kecerdasan anak dan risiko kematian ibu dalam proses persalinan. Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dihasilkan proses politik," jelas Netty dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, Rabu (16/10).

Karenanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan bagaimana mungkin perempuan tidak terlibat dalam ruang publik dan politik. Negara membutuhkan andil dan karya perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi perempuan, anak, keluarga dan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, partisipasi perempuan adalah sebuah keniscayaan untuk



Anggota DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Dok/HR

kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan, bukan sekedar menuntut persamaan hak.

Sisi lain, lanjut Netty, sampai hari ini angka kematian bayi maupun ibu dan rerata lama sekolah perempuan masih rendah. Sementara, jumlah keluarga pra sejahtera, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kasus perdagangan perempuan dan jumlah pekerja anak di Indonesia juga masih tergolong tinggi.

Dengan demikian, sambungnya, kehadiran perempuan di parlemen, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian persoalan-persoalan krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga. "Kiprah perempuan di Parlemen harus memastikan hadirnya kebijakan publik pro rakyat," terangnya.

Dengan tuntutan seperti itu, kata Netty yang pernah menjadi Ketua P2TP2A Jawa Barat, perempuan di Parlemen harus terus meningkatkan kualitas, kapasitas dan kompetensi, agar perannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang.

"Saat ini baru 119 perempuan dari total 575 Anggota DPR. Perlu upaya serius dari pemerintah, partai politik, dan elemen masyarakat guna meningkatkan jumlah perempuan anggota legislatif di DPR," harapnya.

Terakhir, Netty mengingatkan agar perempuan Indonesia terus berkarya dan berprestasi dalam bidang yang digelutinya. "Jangan terjebak dengan *stereotype* yang ada. Tapi jadikan 'dapur, kasar dan sumur' sebagai pijakan untuk melakukan lompatan dan perluasan peran," tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. ■ **ann/sf**

Lima Anggota BPK Terpilih Dilantik, Legislator Imbau Tingkatkan Kinerja

Lima Anggota Terpilih Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) periode jabatan 2019-2024 secara resmi mengucapkan sumpah jabatan dengan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10). Lima Anggota BPK tersebut adalah Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang.

Kelima Anggota BPK terpilih tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 September 2019 melalui Keputusan DPR RI No. 26/DPR RI/2019-2020 tentang Persetujuan DPR

RI terhadap Anggota BPK RI periode 2019-2024. Sebelum ditetapkan, pada 25 September 2019, Komisi XI DPR RI melakukan pemilihan melalui voting terhadap 55 calon Anggota BPK dan kemudian memilih lima Anggota BPK.

Menanggapi pengucapan sumpah jabatan Anggota BPK yang baru tersebut, Anggota DPR RI periode 2019-2024 Achmad Hatari mengimbau, ke depannya kinerja BPK harus semakin lebih ditingkatkan lagi dengan suntikan kelima anggota BPK terpilih itu. Hatari mengingatkan, masih banyaknya laporan hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti sejak tahun 2005 hingga Juni 2019 telah mencapai Rp 13,03 triliun.

Namun demikian, legislator Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengapresiasi tinggal sedikitnya lembaga yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Dari seluruh kementerian lembaga yang ada, hanya terdapat lima lembaga yang tidak mendapat opini WTP.

Tercatat, empat lembaga dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara, satu lembaga yang mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer* yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Kita juga senang bahwa pemerintah pusat sekarang WTP-nya juga sangat meningkat, pemerintah daerah juga sama. Itu prestasi BPK” tutur legislator daerah pemilihan Maluku Utara ini sembari menyampaikan apresiasinya untuk kelima Anggota BPK terpilih. Sebab, sambung Hatari, kelima Anggota BPK terpilih itu telah lolos melalui seleksi dan *fit proper test* ketat yang disaring dari total 62 orang pendaftar.

“Komisi XI telah melakukan *fit and proper test* sebanyak 62 orang. 62 orang ini kita bagi dalam beberapa tahap. Jadi, sampai terakhir tinggal 5 orang terpilih dari yang awalnya 62 orang kemudian mendapat 5 orang yang hari ini dilantik. DPR berharap, dengan 5 orang yang dilantik ini akan semakin memperkuat kinerja BPK,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2014-2019 ini. ■ pun/sf



Anggota DPR RI Achmad Hatari. Foto: Naefuroji/HR

Ittama DPR Dorong Peningkatan Survei Maturitas SPIP 'Online'

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengharuskan lembaga-lembaga melaksanakan SPIP dalam manajemen risiko setiap pelaksanaan kegiatannya. Inspektur Utama (Ittama) DPR RI Setyanta Nugraha mengatakan akan mendorong implementasi Survei Maturitas SPIP yang dilakukan secara *online* di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.



KE DEPANNYA BPKP (BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN) HARUS MENGEVALUASI SISTEM YANG SUDAH BAIK DENGAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN YANG BARU

“Sebetulnya dalam melaksanakan SPIP kita sudah menjalankannya dalam keseharian, tetapi memang masih memiliki kendala dalam pelaksanaan dokumentasi. Seringkali sudah dilakukan, namun tidak disusun dalam satu sistem yang baik,” ucap Totok, sapaan akrab Setyanta, saat menghadiri *Entry Meeting* dan Survei Maturitas SPIP di Ruang Rapat KK2 DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10).

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI

dalam menargetkan setiap kegiatan harus memacu pada regulasi dan pedoman *Standard Operating Procedure* (SOP) secara formal. Totok berharap dengan adanya *Entry Meeting* dan Survei Maturitas SPIP, seluruh Pejabat Eselon 1,2,3,4, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dapat memahami dengan benar.

“Ke depannya BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) harus mengevaluasi sistem yang sudah baik dengan kebutuhan-kebutuhan yang baru. Juga diperlukan *database* dalam pengendalian yang kuat dalam meningkatkan level pengendalian intern,”

harap Totok kepada BPKP yang dalam kesempatan ini diwakili Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegak Hukum BPKP Arif Ardiyanto.

Seperti yang diketahui, sistem yang diterapkan yaitu secara *online* dan berbasis IT (*information technology*). Karenanya responden diharap untuk jujur dalam mengisi pertanyaan agar dapat tercapainya tujuan organisasi dan target yang ditentukan lainnya. “Selama ini memang sudah berbasis IT, BPKP sudah memiliki *tools*-nya dan sudah ada peraturannya juga. Tapi mungkin implementasinya kurang ada,” ungkap Arif.

■ hnm,sh/sf

Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Andri/HR



RUU KKS dan RUU PDP Harus Direalisasikan



Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang BK DPR RI Inosentius Samsul. Foto: Devi/HR

Penggunaan internet di Indonesia sudah berada di atas rata-rata dunia. Dimana pengguna internet di dunia hanya sebesar 54,4 persen, namun di Indonesia jumlahnya sudah mencapai 54,68 persen. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan bisa berdampak menjadi ancaman serius bagi keamanan negara.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul saat menjadi pembicara dalam acara *International Conference on Social Politics* dengan tema 'Cyber Security in the Technological Era 4.0' yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional (UNAS) bekerjasama dengan

Badan Keahlian DPR RI di Kampus UNAS Jakarta, Kamis (17/10).

Sensi, sapaan akrab Inosentius mengatakan, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) sangat *urgent* untuk segera direalisasikan, demi melindungi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang sering menggunakan jasa internet dalam menjalankan usahanya.

"Kepentingan kita dalam seminar ini adalah ingin menyampaikan bahwa dalam menghadapi *cyber security revolusi industry 4.0*, DPR dan pemerintah sedang membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber. Walaupun sebenarnya jika

dihitung dalam tataran secara global, kita termasuk yang agak terlambat karena negara-negara lain sudah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi dan juga undang-undang yang berkaitan dengan keamanan siber ini," ujarnya.

Meski demikian, Sensi berharap, dalam waktu satu atau dua bulan ke depan, RUU KKS sudah bisa diselesaikan pembahasannya. "Karena RUU ini merupakan RUU yang sudah dikerjakan oleh DPR periode



RUU TENTANG PDP DAN RUU KKS SANGAT URGENT UNTUK SEGERA DIREALISASIKAN, DEMI MELINDUNGI KEGIATAN-KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT YANG SERING MENGGUNAKAN JASA INTERNET DALAM MENJALANKAN USAHANYA

sebelumnya, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) nya sudah ada. Tentunya akan masuk masuk dalam kelompok RUU yang *carry over*," jelas Sensi.

Menurutnya, keterkaitan implementasi penanganan *cyber security* dengan keterbukaan informasi yang dilakukan di DPR RI sangatlah penting, karena DPR RI merupakan tempat dirumuskannya kebijakan - kebijakan strategis nasional. Oleh karenanya keamanan di DPR RI juga harus dijaga, baik keamanan fisik maupun keamanan digitalnya.

"Ke depan, untuk keamanan digital DPR harus menjadi prioritas. Walaupun DPR sebagai rumah rakyat dianggap terbuka tetapi kita tetap harus menjaga, karena ada dokumen - dokumen maupun hasil pembicaraan yang harus aman dari kejahatan siber," pungkas Sensi. ■ dep/es

Parlementaria Terdistribusi Baik di Gorontalo

Kepala Sub Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan

Keahlian DPR RI Mediantoro memimpin tim *monitoring* untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi Buletin dan Majalah **Parlementaria** yang didistribusikan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo oleh PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Cabang Gorontalo. Dari hasil pantauan, diketahui Buletin dan Majalah **Parlementaria** telah terdistribusi dengan baik di Gorontalo.

“Kami mohon informasi terkait pendistribusian Buletin dan Majalah **Parlementaria**, apakah ada sistem aplikasi khusus yang dimiliki oleh PT. NCS untuk membuat laporan pendistribusian Buletin dan Majalah **Parlementaria**? Selain itu, kami juga ingin menanyakan apakah ada kendala dalam proses pendistribusian dari PT. NCS pusat ke PT. NCS Gorontalo?” tanya Mediantoro saat

pertemuan Tim *Monitoring* dengan Kepala Cabang PT. NCS Cabang Gorontalo di Gorontalo, Senin (14/10).

Dalam evaluasi laporan rekapitulasi pendistribusian, Tim *Monitoring* Bagian Penerbitan DPR RI mengusulkan agar pembuatan laporan rekapitulasi pendistribusian antara Majalah dan Buletin **Parlementaria** dilakukan secara terpisah, yaitu berdasarkan edisi dan waktu penerbitan Majalah atau Buletin **Parlementaria** tersebut. Hal ini diusulkan supaya pihak PT. NCS Cabang Gorontalo dapat memahami perbedaan yang signifikan, antara Majalah dan Buletin **Parlementaria**.

Selain itu, hal itu guna mempermudah pihak distributor dalam menginventarisir proses pengiriman. “Bedanya bisa dilihat dari covernya. Jika buletin maka pada cover terdapat tulisan Buletin **Parlementaria**, dan untuk majalah, tertulis Majalah **Parlementaria**. Selain itu nomor edisi buletin lebih banyak karena diterbitkan setiap minggu, sedangkan majalah terbit setiap bulan dan jumlah halaman majalah

lebih tebal dibandingkan buletin,” terang Mediantoro.

Kepala Cabang PT. NCS Gorontalo Iswan Abas menerangkan bahwa PT. NCS Gorontalo sudah memiliki sistem aplikasi khusus untuk membuat laporan pendistribusian Buletin dan Majalah **Parlementaria**. Sistem aplikasi khusus ini dibuat untuk memudahkan proses pendistribusian dari PT. NCS Pusat ke PT. NCS Cabang, seperti PT. NCS Cabang Gorontalo ini.

“Sejauh ini kami sudah dibantu melalui aplikasi *website*, yaitu *idss.ptnccs.com*. Melalui sistem ini, bertujuan untuk laporan barang masuk dan peng-*input*-an status kiriman data. Maka dari itu, proses pengiriman dapat dijangkau dan dipantau dengan seksama,” jelas Iswan kepada Tim *Monitoring*.

Iswan juga menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada masalah ataupun kendala dalam proses pendistribusian Buletin dan Majalah **Parlementaria** di Gorontalo.

“Beruntungnya letak geografis Gorontalo yang bukan merupakan provinsi kepulauan, sekaligus bisa memudahkan seluruh proses pendistribusian Buletin dan Majalah **Parlementaria**. Untuk pendistribusian dari pusatpun sudah diberikan alamat yang jelas, tujuannya pun juga jelas,” ungkap Iswan.

Adapun Tim *Monitoring* dan Evaluasi Distribusi **Parlementaria** yang dipimpin langsung oleh Kasubag Bagian Penerbitan DPR RI Mediantoro, dan diikuti oleh Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Mohammad Djazuli, serta Tim *Monitoring* dan Evaluasi Pendistribusian Majalah dan Buletin **Parlementaria** yang terdiri dari Barliansyah, Subadri, Maria Dumaris, Friederick Muenchen, dan Dipa Natalio.



Tim *Monitoring* dan Evaluasi Buletin dan Majalah **Parlementaria** ke Gorontalo. Foto: Dipa/HR

■ dip/sf

Setjen DPR Semarakkan Peringatan Hari Museum Indonesia

Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI ikut menyemarakkan pameran museum dalam rangka Hari Museum Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Pameran yang berlangsung selama tiga hari (11-13 Oktober 2019), di Museum Fatahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta itu mengangkat tema “Menyatukan Keberagaman” dengan menampilkan kekayaan ragam etnik dan suku yang ada di Indonesia.

Pada perhelatan tersebut, Setjen DPR RI melalui Bidang Arsip dan Museum (Armus) menampilkan perkembangan sejarah parlemen dari masa ke masa. Diawali dari era Volksraad, parlemen di zaman penjajahan Belanda hingga parlemen terkini. Keikutsertaan Setjen dan BK DPR RI yang menampilkan sejarah parlemen Indonesia menambah corak pada pameran museum tersebut.

“Ini adalah kesempatan yang bagus sekali bagi museum DPR yang ikut berpartisipasi dalam Festival Museum dalam rangka memperingati Hari Museum Indonesia tanggal 12 oktober ini. Tema besarnya adalah menyatukan keberagaman, kita mencoba mengangkat tema yang sejalan dengan tema besar hari ini, yaitu Beragam Tapi Bersatu,” urai Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR RI Endang Suryastuti di Jakarta, beberapa waktu lalu. Turut hadir dalam pameran ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen dan BK DPR RI Nunu Nugraha Khuswara.

Museum DPR RI juga menampilkan profil para tokoh perempuan yang ikut berperan dalam pembentukan



Kepala Pusat Data dan Informasi Setjen dan BK DPR RI Nunu Nugraha Khuswara saat meninjau pameran Museum DPR RI dalam rangka Hari Museum Indonesia. Foto: Runi/HR

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) atau cikal bakal parlemen Indonesia, diantaranya Maria Ulfa, Suyatin, dan Sukemi. Hingga saat ini, kiprah perempuan dalam keparlemen Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, saat ini DPR RI dipimpin Puan Maharani yang juga perempuan.

Endang menambahkan, saat ini Museum DPR sedang berbenah mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dengan mengembangkan museum digital, karena memang saat ini eranya digital yang sangat digemari kaum milenial. “Kita sedang

mengembangkan museum digital yang rencananya akan kita *launching* tahap pertama bulan November tanggal 26 bersamaan dengan penyerahan arsip ke ANRI,” ungkap Endang.

Salah seorang pengunjung museum, Andro menilai apa yang disajikan oleh museum DPR RI sangatlah informatif dan bermanfaat bagi masyarakat terutama kalangan pelajar dan mahasiswa. “Selain pusat kegiatan politik, ternyata DPR juga peduli pada pelestarian benda-benda bersejarah, terutama yang menyangkut sejarah parlemen,” pujiannya. ■ **afr/es**



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Ketua MPR RI, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN saat konferensi pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10). Foto: Kresno/Jaka



Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin menghadiri pelantikan lima anggota BPK terpilih yaitu Achsanul Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan Pius Lustrilanang yang dipandu Ketua Mahkamah Agung, M. Hatta Ali di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (17/10). Foto: Naefuroji/HR



Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Djaka Dwi Winarko menerima kunjungan konsultasi DPRD Pagaram, Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (17/10). Foto: Jaka/HR

